

**DAMPAK HUBUNGAN DIPLOMATIK AS - PERANCIS PASCA KASUS
PENYADAPAN YANG DILAKUKAN OLEH AS TERHADAP PRESIDEN
PERANCIS FRANCOIS HOLLANDE**

Oleh :

Suwita Lora

(lora_suwita@yahoo.com)

Pembimbing : Indra Pahlawan, S.IP, M.Si

Bibliografi : 5 Jurnal, 18 Buku, 8 Dokumen Resmi, 3 Skripsi, 54 Internet

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28295

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research is a study of diplomacy which discusses about the impact of diplomatic relations after the wiretapping case conducted by the American against the French. Unauthorized wiretapping is an unlawful act which may interfere with a person's privacy. However, in the context of inter-state, tapping is actually a common practice, performed to determine the actual intentions of a country, especially with regard to the national interests. Besides, detailed information about the policy and its implementation needs to be known in order to anticipate and prevent acts of surprise. Unauthorized wiretapping is a disgraceful act and a violation of ethics diplomacy, especially if applied to friendly countries as carried out by United States toward France.

Herefore it is necessary to take bold steps yet precise and measurable actions. Crime or Cybercrime technology that refers to to cyberspace (cyberspace) and the criminal who uses a computer. Under these conditions, the relationship between the country much easier than before, a country may have a problem with other countries. One case that is happening now is a matter of American espionage conducted against the France. Actions taken by the American influence on diplomatic relations between the two countries, which has existed for a long time. Franch government's take action to protect the state and its citizens in case of espionage.

Keywords : Diplomacy, espionage, cybercrime, tapping

Pendahuluan

Penelitian ini akan mengkaji tentang dampak yang ditimbulkan terhadap hubungan Diplomatik pasca

terungkapnya kasus penyadapan yang dilakukan oleh AS terhadap Perancis. Masalah mengenai intelijen saat ini menjadi topik yang sering dibicarakan oleh masyarakat dunia.

Hai ini dipicu oleh terkuaknya kasus dimana Amerika Serikat melakukan aksi spionase atau yang sering disebut dengan aksi memata – matai melalui teknologi penyadapan Negara lain seperti Russia, Tiongkok, Brazil, Jerman, Indonesia, dan Perancis.

Kasus yang terbongkar karena ulah Edward Snowden, seorang mantan konstruksi *National Security Agency* (NSA) ini tentunya sangat berdampak bagi Amerika Serikat khususnya Presiden Barrack Obama. Hal yang menarik disini adalah, bukan hanya Negara lain yang menjadi korban penyadapan Amerika Serikat, tetapi warga Negara AS ikut disadap oleh pemerintahnya sendiri.

Hasil Sadapan percakapan antara pemimpin Perancis dengan beberapa pejabat dan Diplomat asing merupakan mengenai masalah-masalah penting. Salah satunya membahas soal krisis utang Yunani dan Hubungan pemerintahan Hollande dengan Angela Merkel di Jerman. *WikiLeaks* mengatakan, bocoran kali ini lebih mendalam jika dibandingkan dengan dokumen yang dibebaskan Edward Snowden mengenai penyadapan ponsel Merkel

Kerangka Teori

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Perspektif realis Menurut pandangan kaum Realis, Negara merupakan aktor utama, sementara aktor *non-state* dipandang tidak penting. Anarki merupakan salah satu ciri Realisme dimana Negara memegang kedaulatan tertinggi, tidak ada yang

lebih berkuasa di atas Negara. Pada awalnya pemikiran Realisme muncul ketika perspektif liberalisme runtuh seiring dengan kegagalan LBB dalam menciptakan perdamaian dunia dan pecahnya Perang Dunia I.

Berdasarkan pandangan kaum Realis yang bersifat pesimis, terdapat *Security Dilemma*. *Security Dilemma* muncul ketika sebuah Negara merasa terancam dengan Negara lainnya. Sehingga negara akan melakukan kerja sama dalam bentuk aliansi maupun melaksanakan perjanjian. Namun, hal tersebut cenderung bersifat sementara. Pandangan Realis mengutamakan *self-help* dalam mempertahankan eksistensinya.

Teori yang digunakan adalah teori Diplomasi. Pada dasarnya diplomasi adalah kajian hubungan internasional dengan dasar teoritikal yang lemah. Namun beberapa tahun terakhir ini, studi diplomasi akademis nampaknya telah terevitalisasi. Hal ini dikarenakan diplomasi menekankan pada negosiasi. Berdasarkan kamus *Oxford*, diplomasi didefinisikan sebagai ‘kegiatan hubungan internasional dalam bentuk negosiasi’.

Salah satu cara yang sering dipraktek untuk mengurangi tekanan konflik adalah Diplomasi.¹ Holsti menambahkan bahwa negosiasi adalah unsur yang terpenting dalam Diplomasi.² Seperti sekarang untuk diplomasi tidak saja dilakukan oleh diplomat disatu negara, tetapi lebih banyak dengan utusan langsung, penggunaan Media massa, dan

¹ Holsti, K. J., 1967, *International Politik "A Framework For Analysis,"* Prentice Hall, New Jersey, USA

² *Ibid*, hal. 238

Media Informasi yang lebih luas. Dalam hegemoni tunggal pola-pola hubungan diplomasi antar dua negara sedikit berkurang.

Seperti Amerika Serikat dalam hubungan Diplomatiknya lebih cenderung mengajak langsung sebagai koalisi, seperti di Afghanistan George Bush langsung mengatakan “*Either you are with us or you with terrorist*” melalui media masa sehingga negara-negara yang tidak mau dituduh mendukung Teroris dengan segera memihak Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak perlu melakukan diplomasi kesetiap negara, cukup mengatakan seperti diatas dalam pidato kepresidenannya negara-negara lain dengan cepat bereaksi, karena Amerika Serikat mempunyai Power yang kuat.

Penting untuk membedakan antara diplomasi dan Kebijakan luar negeri. Diplomasi mengacu pada pelaksanaan hubungan dengan seseorang, sedangkan *Foreign Policy* mengacu pada ‘perihal’ tersebut, sebuah strategi atau rencana yang dikembangkan oleh *decision maker* untuk berhubungan dengan Negara lain, yang bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan spesifik yang disebut dengan *national interest*. Harper dan Row (1973) berpendapat bahwa kebijakan luar negeri adalah sebagai poin yang memperlancar kebangkitan dalam sistem internasional ke dalam arena domestic dan di mana politik domestic bertransformasi ke dalam *international behavior*.³ Itulah mengapa kebijakan luar negeri

menjadi kajian penting dalam ilmu hubungan internasional.

Analisis keamanan memerlukan suatu cara pandang yang menempatkan negara dan sistem ke dalam sebuah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dimana negara sebagian terbentuk dengan sendirinya dan sebagian lain dibentuk oleh lingkungan anarki yang kompetitif dan sengit. Lingkungan domestik dan dinamika internasional, keduanya merupakan hal yang paling penting bagi analisis keamanan karena merupakan hubungan yang kompleks di antara keduanya

Pembahasan

Penyadapan telepon merupakan pemantauan percakapan telepon dan Internet oleh pihak ketiga, seringkali dilakukan dengan cara rahasia. Percakapan telepon dapat direkam atau dipantau secara tidak resmi, baik oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak yang disadap, ataupun direkam oleh salah satu pihak yang melakukan panggilan telepon. Penyadapan telepon dikontrol secara ketat dan pada umumnya dilarang dengan alasan privasi, namun juga bisa dilegalkan untuk alasan tertentu, sesuai dengan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan.

Negara Amerika Serikat, penyadapan telepon telah dilakukan di bawah perintah beberapa Presiden, disertai dengan surat perintah Mahkamah Agung. Pada tanggal 19 Oktober 1963, Jaksa Agung Robert F. Kennedy, yang menjabat di bawah pemerintahan John F. Kennedy dan Lyndon B. Johnson, memberi

³ Adam Watson. (1982). *Diplomacy: The Dialogue Between States*. Oxford: Routledge Publishing

kewenangan pada FBI untuk menyadap komunikasi dari Martin Luther King, Jr.⁴

Hal tersebut menyimpulkan bahwa kasus penyadapan terhadap pemerintah suatu negara sudah berlangsung lama dilakukan Kasus penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Perancis, berdampak terhadap hubungan diplomatik kedua negara. Pasalnya, Amerika dan Perancis dikenal dunia sebagai negara persekutuan, dan mitra kerjasama yang baik. Amerika dan Perancis banyak terlibat dalam kerjasama hampir disemua sektor. Kedua negara ini juga masuk dalam Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik utara (NATO) yang merupakan organisasi di bidang keamanan dan militer. Amerika Serikat menyadap tiga mantan Presiden Perancis, Jacques Chirac dan Nicolas Sarkozy, dan Presiden baru Perancis pada saat ini yaitu Francois Hollande. Berdasarkan berita dari *Reuters*, laporan penyadapan ini pertama kali disampaikan oleh media harian Perancis yaitu *Liberation* dan situs berita *Mediapart*.

Media lokal Perancis tersebut memberitakan bahwa NSA (*National Security Agency*) telah memata – matai tiga Presiden Perancis dari tahun 2006 hingga Mei 2012, saat Hollande terpilih menggantikan Sarkozy.

Informasi tersebut diberitakan oleh *WikiLeaks*, yang merupakan situs penyebar rahasia pemerintahan, mengutip sebuah laporan intelijen.

WikiLeaks mengklaim bahwa data tersebut diperoleh dari penyadapan NSA terhadap komunikasi Hollande (yang menjabat dari tahun 2012 hingga saat ini), Sarkozy (2007 – 2012), dan Chirac (1995 – 2007), sejumlah menteri kabinet, serta duta besar Prancis untuk Amerika Serikat.

Amerika Serikat melakukan kegiatan intelijen secara global. Tidak ada sebuah negara yang luput dari pemantauan mata-mata (intelijen) yang dilakukan oleh Amerika. Tujuannya adalah untuk mengetahui setiap negara seberapa besar pengaruh kegiatan terorisme yang akan mengancam keamanan global, termasuk terhadap Amerika. Tindakan ini memberikan dampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat di sebuah negara. Ini menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana Amerika melakukan tindakan mata-mata, karena kepentingan negaranya

Sejumlah warga Jerman mengkritik sanksi yang dikeluarkan Pemerintah Jerman. Mereka menyebut sanksi itu tidak cukup karena kerjasama intelijen yang dibatalkan hanya sebagian kecil saja. Merespon kritik itu lebih jauh bahkan kini Jerman dan Prancis juga mendesak dilahirkannya aturan anti-penyadapan transatlantik untuk segera dikeluarkan.⁵ Presiden Pusat Keamanan dan Intelijen Strategis Eropa Claude Moniquet memiliki keraguan atas aturan tersebut. Para pemimpin Uni Eropa memberikan

⁴Studi Kasus Hubungan Diplomatik, di akses melalui https://www.academia.edu/15573463/STUDI_KASUS_HUBUNGAN_DIPLOMATIK

⁵ *Jerman Kecam Penyadapan AS atas Merkel*, <http://www.voaindonesia.com/content/jerman-kecam-penyadapan-as-atas-merkel/1778150.html> [diakses 22 April 2016, 15:20 wib]

peringatan, rasa saling tidak percaya akan merusak kerjasama intelijen. AS pun berupaya untuk terus meredakan kemarahan dari sekutunya.

Sejumlah senator dan beberapa petinggi Pemerintah Amerika Serikat (AS) membela aksinya menyadap Uni Eropa (UE). Mereka menyebut aksi itu juga biasa dilakukan negara lainnya. Badan Keamanan Nasional AS, NSA, merilis hal tersebut melalui *Associated Press*. Informasi yang dibocorkan membuka klaim bahwa spionase sistematis dilakukan NSA dan CIA dalam skala global. Dengan target utama seperti Cina dan Rusia, termasuk sejumlah sekutu seperti Uni Eropa dan Brasil. Skandal ini juga menyebabkan NSA dipaksa mengakui bahwa mereka telah mengumpulkan data surat elektronik dan data telepon jutaan warga Amerika.

Amerika Serikat melakukan tindakan spionase tidak hanya terhadap Perancis saja. Kanselir Jerman, Angela Merkel ikut menjadi korban penyadapan yang dilakukan oleh NSA. Tahun 2014 pemerintah Jerman marah dan protes terhadap pemerintah Amerika Serikat karena telah melakukan tindakan penyadapan. Namun pihak Amerika Serikat melalui *National Security Agency* (NSA) ternyata masih melakukan aksi tersebut lagi. Hal ini membuat pemerintah Jerman kembali mengirimkan protes keras terhadap Amerika Serikat.

Jerman telah menyerukan agar pembicaraan perjanjian pasar bebas antara Uni Eropa dan AS ditangguhkan karena masalah ini. Isu

penyadapan juga diperkirakan akan berdampak pada kebijakan Uni Eropa untuk memperketat perlindungan data pribadi. Majalah *Der Spiegel* turut membongkar kelakuan pemerintah AS melalui Intelijen AS yang disebut menyadap Kedutaan UE di Kota Washington dan New York. Mereka juga menyadap markas UE yang terletak di Kota Brussels, Belgia.

Amerika Serikat melakukan aksi mata-mata dalam proses negosiasi kerja sama dagang AS-UE. Pejabat Uni Eropa menyatakan, skandal ini dapat mengancam keberlangsungan kerja sama ekonomi antara kedua belah pihak. Komisioner Hukum UE,⁶ Viviane Redding telah memberikan respon keras terhadap aksi tersebut.

Uni Eropa akan mendukung serius undang-undang yang diusulkan Komisi Eropa pada awal 2012 lalu untuk membatasi cara pengumpulan data di Eropa oleh perusahaan-perusahaan internet, seperti *Google* dan *Facebook*, yang dibagi dengan negara-negara non-Uni Eropa. Undang-undang itu juga akan memberikan hak kepada warga Uni Eropa untuk meminta jejak digital mereka dihapus dan mengenakan denda 100 juta *euro* (US\$ 138 juta) atau lebih atas pelanggaran aturan.⁷ Amerika Serikat mengkhawatirkan jika aturan itu menjadi undang-undang akan menaikkan biaya pengelolaan data di Eropa. *Google*, *Yahoo!*, *Microsoft* dan perusahaan internet lain berusaha

⁶ Jerman – AS, http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/10/131027_jerman_as, [diakses pada 22 April 15:03 wib]

⁷ *Loc.cit.*

keras melakukan lobi untuk menghalangi proposal itu di setuju pemimpin-pemimpin Uni Eropa.

Kanselir Jerman Angela Merkel menjadi sosok simbol kemarahan Eropa atas AS tentang tuduhan penyadapan itu. Merkel merupakan salah satu kepala negara yang disadap oleh Negeri Paman Sam. Merkel pun bergabung dengan Presiden Brasil Dilma Rousseff untuk mengajukan proposal resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai perlindungan kebebasan hak sipil. Keduanya merupakan kepala negara yang menjadi sosok yang disadap oleh dinas intelijen AS, NSA.

Pemerintah Jerman memutus kerjasama intelijen yang dimilikinya dengan AS dan Inggris. Langkah itu diambil sebagai sanksi atas aksi penyadapan yang dilakukan kedua negara di Jerman. Jerman memang sensitif dengan aksi penyadapan. Aksi represif pada masa pemerintahan Nazi dan rezim komunis di Jerman Timur membuat negara itu sangat menghargai kebebasan warganya. Snowden membongkar aksi penyadapan AS kepada Jerman melalui majalah *Der Spiegel*. Selain Jerman, AS juga menyadap negara-negara anggota Uni Eropa (UE).

Sejumlah warga Jerman mengkritik sanksi yang dikeluarkan Pemerintah Jerman. Mereka menyebut sanksi itu tidak cukup karena kerjasama intelijen yang dibatalkan hanya sebagian kecil saja. Merespon kritik itu lebih jauh bahkan kini Jerman dan Prancis juga mendesak dilahirkannya aturan anti-penyadapan transatlantik untuk

segera dikeluarkan.⁸ Presiden Pusat Keamanan dan Intelijen Strategis Eropa Claude Monique memiliki keraguan atas aturan tersebut. Para pemimpin Uni Eropa memberikan peringatan, rasa saling tidak percaya akan merusak kerjasama intelijen. AS pun berupaya untuk terus meredakan kemarahan dari sekutunya.

Sejumlah senator dan beberapa petinggi Pemerintah Amerika Serikat (AS) membela aksinya menyadap Uni Eropa (UE). Mereka menyebut aksi itu juga biasa dilakukan negara lainnya. Badan Keamanan Nasional AS, NSA, merilis hal tersebut melalui *Associated Press*. Kepala pemerintahan Uni Eropa membahas penyadapan telepon Kanselir Jerman Angela Merkel. Eropa mengutus Merkel dan Hollande untuk berbicara dengan Obama. Ketua Dewan Eropa Hermann Van Rompuy menerangkan, semua kepala pemerintahan dari 28 negara anggota menyambut niat Prancis dan Jerman untuk melakukan pembicaraan bilateral dengan Amerika Serikat tentang kegiatan dinas rahasia.⁹ Terutama harus ditegaskan, apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh dinas rahasia Amerika.

Kritik keras muncul dari Berlin dan Paris setelah laporan

⁸ *Jerman Kecam Penyadapan AS atas Merkel*, <http://www.voaindonesia.com/content/jerman-kecam-penyadapan-as-atas-merkel/1778150.html> [diakses 22 April 2016, 15:20 wib]

⁹ *Pertemuan Uni Eropa Bahas Penyadapan NSA*, <http://www.dw.com/id/pertemuan-uni-eropa-bahas-penyadapan-nsa/a-17182638> [diakses 23 April 2016 01:42 wib]

tentang penyadapan telepon Kanselir Jerman Angela Merkel. Laporan itu berasal dari informasi yang dikumpulkan oleh bekas kontraktor NSA Edward Snowden tentang kegiatan dinas rahasia Amerika Serikat yang melakukan penyadapan data secara luas di berbagai bagian dunia.¹⁰ Kegiatan NSA sebelumnya sudah menyulut kritik keras di Brasil dan Meksiko. Presiden Brasil Dilma Rousseff bulan ini membatalkan rencana kunjungan ke Amerika Serikat setelah muncul laporan bahwa NSA menyadap komunikasi pemerintah Brasil. Presiden Perancis Francois Hollande juga menyampaikan protes keras atas penyadapan terhadap warga Perancis.

Van Rompuy mengatakan, pembicaraan antara Uni Eropa dan Amerika harus bertujuan "mencari kesepakatan baru tentang kerjasama dalam bidang telekomunikasi, Ia menegaskan bahwa harus ada pemahaman baru "tentang hubungan antara negara-negara Eropa dengan Amerika Serikat".¹¹ Presiden Perancis Francois Hollande mengatakan kepada wartawan, sudah ada komisi ahli yang memeriksa apa saja kegiatan penyadapan NSA di Eropa. Tim ahli ini bekerjasama dengan mitra-mitra di Amerika untuk mengungkapkan kasus ini dengan cepat. Hollande berpendapat bahwa isu ini belum berakhir dan masih ada aksi spionase yang akan terungkap di masa depan. Harian Perancis Le Monde minggu ini melaporkan, NSA memonitor sekitar 70 juta hubungan

¹⁰ *Ibid.* <http://www.dw.com/id/pertemuan-uni-eropa-bahas-penyadapan-nsa/a-17182638>

¹¹ *Loc.cit*

telepon di Perancis.¹² Jumlah angka tersebut bukanlah jumlah yang sedikit, oleh karena itulah Hollande akan bertindak untuk mencegah terjadinya kasus yang sama dimasa yang akan datang.

Kanselir Jerman Angela Merkel menerangkan, sekalipun ada kasus penyadapan, Eropa harus melanjutkan perundingan tentang perdagangan bebas dengan Amerika Serikat. Merkel secara khusus berbicara lewat telepon dengan Presiden Barack Obama untuk mengungkapkan kekecewaannya atas aksi penyadapan NSA. Media melaporkan, NSA kemungkinan besar menyadap telepon dari 35 kepala pemerintahan dari berbagai negara selama pemerintahan George W Bush.¹³ Isu spionase dan peyadapan meluas setelah Edward Snowden membocorkan dokumen-dokumen rahasia NSA.

Selain Amerika Serikat, penyadapan besar-besaran juga dilakukan oleh dinas rahasia Inggris GCHQ. Parlemen Eropa menuntut agar perlindungan data diperkuat dan perusahaan-perusahaan Amerika di Eropa dilarang memberi data kepada dinas rahasia, kecuali ada dugaan tindakan kejahatan.¹⁴ Pertemuan Uni Eropa di Brussel sebenarnya diagendakan membahas kerjasama

¹² *Jerman Usir Mata – mata Amerika Serikat*, <http://lagi.online/global/2076205/jerman-usir-mata-mata-amerika-serikat.html> [diakses 22 April 2016, 14:17 wib]

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Pertemuan Uni Eropa Bahas Penyadapan NSA*, <http://www.dw.com/id/pertemuan-uni-eropa-bahas-penyadapan-nsa/a-17182638> [diakses 23 April 2016, 012:42].

teknologi informasi dan masalah pengungsi.

Konsekuensi Hukum terhadap Negara yang melakukan tindakan Spionase terhadap Negara lain.

Hubungan diplomatik antar Negara yang mengalami kasus spionase, tindakan *Persona non-Grata*¹⁵ terhadap perwakilan diplomatik dapat dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Konvensi Wina 1961. Hal tersebut menandakan bahwa hubungan diplomatik antara kedua pihak telah berakhir sesuai dalam Pasal 43 Konvensi Wina. Selain melakukan tindakan *Persona non-Grata* dan pemutusan hubungan kerjasama, Negara yang melakukan tindakan spionase dapat dibawa ke hadapan Mahkamah Internasional (ICJ).

Hal ini dimungkinkan apabila pelaku penyadapan merupakan perintah atau bagian dari organ pemerintahan Negara tersebut. Berdasarkan hal tersebut Pasal 4 *Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, menyebutkan bahwa sikap dari setiap organ Negara akan dianggap sebagai tindakan Negara tersebut. Selanjutnya disebutkan bahwa yang termasuk organ Negara, adalah setiap orang atau badan yang memiliki status sesuai dengan hukum internal Negara tersebut.¹⁶ Pembuktian

bahwa tindakan penyadapan memang dilakukan oleh organ Negara sangat penting dilakukan, karena yang dapat diperkarakan dalam ICJ hanyalah Negara saja sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 34 ayat (1) Statuta ICJ.

Prinsip dalam Huku Internasional Terkait kasus penyadapan Prinsip Kedaulatan Negara

Prinsip bahwa suatu Negara tidak boleh melaksanakan kedaulatan (Jurisdiksinya) di dalam wilayah negara lain dan prinsip persamaan kedaulatan antara semua anggota PBB saling berhubungan satu sama lain. Prinsip persamaan kedaulatan antara semua anggota PBB (Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB),¹⁷ baru ada apabila suatu negara berdaulat atas wilayahnya yang dengan perkataan lain tidak ada negara lain yang melaksanakan kewenangan negara tersebut terhadap negara tersebut.

Piagam PBB Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB menyatakan: Segenap anggota dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan kedaulatan yang dimilikinya, maka ada yang

¹⁵ Merupakan penolakan perutusan diplomatik suatu negara yang disebabkan oleh latar belakang, atau sifat pribadi pejabat diplomatik yang menurut Negara itu bermasalah, Diakses dari <http://www.sosbudpolhuk.info/2013/06/pengertian-persona-non-grata-dalam.html>

¹⁶ Hukum Online, *Negara Bisa Bawa Kasus Penyadapan ke ICJ*, Diakses pada tanggal:

25 April 2016, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt528b36770e68f/negara-bisa-bawa-kasus-penyadapan-ke-icj>.

¹⁷ Piagam PBB https://unic.un.org/aroundworld/unics/comm on/documents/publications/uncharter/jakarta_charter_bahasa.pdf, diakses pada 17 April 2016, 23:49)

dinamakan dengan yurisdiksi negara.¹⁸ Menurut John O'Brien, ada tiga macam yurisdiksi yang dimiliki oleh negara¹⁹, yaitu:

a) Kewenangan Negara untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum terhadap orang, benda, peristiwa maupun perbuatan di wilayah teritorialnya (*legislative jurisdiction or prescriptive jurisdiction*)

a. Kewenangan Negara untuk memaksakan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya (*executive jurisdiction or enforcement jurisdiction*)

b. Kewenangan pengadilan Negara untuk mengadili dan memberikan putusan hukum (*judicial jurisdiction*).

Beberapa jenis yurisdiksi salah satunya ialah yurisdiksi ekstrateritorial.

Yurisdiksi ekstrateritorial, diartikan sebagai kepanjangan secara semu (*quasi extentio*) dari yurisdiksi suatu negara di wilayah yurisdiksi negara lain, atau kewenangan suatu Negara yang diberikan oleh hukum

internasional untuk melaksanakan kedaulatannya di wilayah yang tidak termasuk yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi kuasi teritorialnya.

Prinsip *Par in parem non habet imperium*

Menurut Hans Kelsen, prinsip hukum "*par in parem non habet imperium*"²⁰ ini memiliki beberapa pengertian:

a. Suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi melalui pengadilannya terhadap tindakan-tindakan negara lain, kecuali negara tersebut menyetujuinya.

b. Suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan suatu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dari perjanjian internasional tersebut.

c. Pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan tindakan suatu negara lain yang dilaksanakan di dalam wilayah negaranya.

Prinsip Persamaan Kedaulatan
Prinsip Persamaan Kedaulatan antara

¹⁸ *Ibid*, Piagam PBB.

¹⁹ Diakses dari

https://www.academia.edu/8239113/ANALISIS_PENYADAPAN_AMERIKA_SERIKAT_DAN_AUSTRALIA_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_INTERNASIONAL

²⁰ Diakses dari

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-yurisdiksi-definisi-negara.html>

semua anggota PBB, antara lain pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 ayat (1) Piagam PBB yang secara lengkap berbunyi:

Pasal 1 ayat (2): *“Mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang wajar untuk mempertahankan perdamaian universal.”*²¹

Pasal 2 ayat (1): *“Organisasi didasarkan pada Prinsip Persamaan Kedaulatan antara semua Anggotanya.”*²²

Prinsip non-intervensi Tidak ada satu negara pun yang mempunyai hak untuk campur tangan, secara langsung atau tidak langsung, dengan alasan apapun dalam urusan internal (dalam) atau eksternal (luar) negeri suatu negara. Dalam Hubungan Internasional dikenal beberapa prinsip yang digunakan dalam membina hubungan kerjasama internasional antara lain:

- a. Saling menghormati kedaulatan negara lain
- b. Saling menguntungkan
- c. Diabadikan untuk kepentingan nasional demi kesejahteraan masyarakat,
- d. Diarahkan untuk mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan,

²¹ Piagam PBB

https://unic.un.org/aroundworld/unics/comm on/documents/publications/uncharter/jakarta charter_bahasa.pdf, diakses pada 17 April 2016, 23:49)

²² *Ibid*, Piagam PBB.

perdamaian abadi dan keadilan sosial

Prinsip *inalienable rights*

Bahwa setiap negara memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat untuk memilih sistem politik, ekonomi, sosial, dan budayanya

Kesimpulan

Aksi spionase yang dilakukan oleh Amerika terhadap Presiden Prancis menimbulkan dampak yang buruk terhadap hubungan diplomatik kedua negara. Penyadapan tersebut sudah dilakukan Amerika dari tahun 2006. Hal ini membuat Pemerintah beserta warga Perancis marah karna menganggap Amerika sudah melakukan pengkhianatan terhadap negara yang selama ini menjadi sekutu dan mitra kerjasama yang baik. Tindakan penyadapan oleh AS ini jelas tidak sehat dalam menjalin hubungan internasional, karena didasarkan atas kecurigaan dan keinginan untuk mengetahui informasi terlebih dahulu serta mengantisipasi kebijakan yang diambil pemerintah Perancis.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prancis melakukan aksi dengan memanggil Duta Besar Amerika untuk Prancis dengan tujuan untuk dimintai keterangan. Presiden Prancis mengutuk perbuatan AS karna telah merasa dikhianati. Selain itu Pemerintah Prancis juga melakukan pertemuan dengan Presiden AS yaitu Obama untuk menjelaskan mengapa AS melakukan penyadapan terhadap Negaranya. Kemampuan untuk berhubungan

dengan negara lain dewasa ini mempunyai arti yang sangat penting dalam masyarakat internasional karena merupakan suatu bukti yang kuat atas kemampuan negara menjaga integritas teritorialnya. Dengan kemampuan tersebut menumbuhkan persamaan kedudukan / persamaan derajat antar negara, sekaligus merupakan refleksi adanya kemerdekaan dan kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara.

Terkuaknya kasus penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini dapat merubah pandangan seluruh dunia terhadap Amerika Serikat berubah total. Tindakan tersebut dapat memicu terciptanya *security dilemma* diantara negara – negara sekutu Amerika Serikat. Hal ini terjadi karena negara tersebut merasa tidak aman menjalin relasi dengan Amerika Serikat, Negara – negara tersebut akan merasa *insecure* akan menjadi korban spionase Amerika kembali. Sifat *insecure* inilah yang akan menciptakan *balance of power*, seperti yang kita ketahui *balance of power* secara harfiah memberikan dampak yang buruk bagi keseimbangan sistem internasional.

Selain itu dengan meningkatnya kecurigaan antar negara satu dengan yang lainnya proses kerjasama akan runtuh dan kedamaian didalam dunia internasional akan jauh dari kata “terjadi”. Berdasarkan aksi spionase yang dilakukan oleh Amerika tersebut, Amerika harus mampu mengambil pelajaran atas

apa yang telah dilakukannya terhadap Perancis, dan Negara – negara yang pernah menjadi korban Amerika tersebut. Amerika harus mampu merubah total sistem operasi intelijennya.

Melakukan perubahan terhadap sistem operasi intelijen Amerika, akan mengurangi konsekuensi dan resiko bagi Amerika Serikat, karena dengan begitu Amerika bisa merubah pandangan dunia yang menjuluki Amerika sebagai Negara tukang sadap dunia. Kasus spionase antara negara bukanlah hal baru. Tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat sudah jauh dari batas wajar dan tentunya hal yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini sangat bersifat destruktif bukan hanya bagi Amerika Serikat sendiri akan tetapi juga bagi sistem Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Andi Purwono, *KONTROVERSI WIKILEAKS DAN DILEMA DIPLOMASI*. Spektrum Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional Unwahas, Vol. 8, No. 1, Januari 2011

Roberts, J.M . 1996. *A History of Europe*. Bath: The Bath Press Ltd, p-550-555

Stefanie Holim, *Upaya Amerika Serikat dalam mengatasi Pembobolan Data oleh Wikileaks*. eJournal Ilmu

Hubungan Internasional, 2015, 3 (1): 77 – 86.

Stephen M. Walt, “*International Relations: One World, Many Theories*”, Foreign Policy, No. 110, Spring 1998.

Snyder, Jack L, Journal of Democracy, Volume 18, Number 3, July 2007, Published by The Johns Hopkins University Press.

Buku :

Agus Sriyono, dkk, 2004, *Hubungan Internasional, Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 176.

Andi Hamzah, 1990, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23-24.

Barry Buzan, *People, state, and fear : An Agenda for international security studies in the post-cold war era*. ECPR Press Classics.

Frederic P. Vandome, Agnes F. Mcbrewster, John Miller (Ed.), Julian Assange, Diterjemahkan Melody Violine (*Alphascript Publishing*, 2010), dan Buku Edward R. Miller-John (Ed.), *WikiLeaks: Removing the*

“*Top Secret*” Seal, diterjemahkan Ahmad Syukron (Fastbook Publishing, 2010).

Hamzah Andi, 1990 *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta.

Holsti, K. J., 1967, *International Politik "A Framework For Analysis,"* Prentice Hall, New Jersey, USA

Hendri F. Isnaeni, 2011 *Indonesia, WikiLeaks, & Julian Assange*, Ufuk Press, Jakarta.

Hans J. Morgentahau, 1990, *Politik Antarbangsa: Perjuangan Untuk Kekuasaan dan Perdamaian*, Bandung: MANNA, Lembaga Penterjemahan dan Penyaduran, hal. 367.

Jill Steans & Lloyd Pettiford, 2009, *International Relations: Perspectives and Themes*, Terj., Deasy Silvia Sari, Pustaka Pelajar: Yogyakarta

JG Starke, 2006, *Pengantar Hukum Internasional (edisi kesepuluh)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 209.

Kusumaatmadja, Mochtar., Ety R. Agoes, 2013, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni: Bandung.

- Mauna, Boer.,2013, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni:Bandung
- Mohtar Mas'oed, 2013 *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, hal. 185
- Sankt Augustin, 2007, *Konrad Adenauer and the European Integration*, Berlin: Konrad Adenauer Foundation, Archive for Christian Democratic Policy (ACDP), hal. 19.
- Sefriani, 2012. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers: Jakarta
- Syahmin AK, 2008, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 93.
- Wijayanti, Lies, *The Dancing Leader; Idealisme kaum Idealis*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Yuwono, Ismantoro Dwi, 2011, *Kupas Tuntas Intelijen Negara dar A Sampai Z*, Penerbit Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- Council of Europe Convention on Cybercrime (COECCC)*, 2001 Budapest, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/7_conv_budapest_7_conv_budapest_en.pdf
- ETSI TS 101 331, *Definition of Interception*. www.pda.etsi.org/pda
- NATO *International Archives*, <http://www.nato.int/archives/ismayrep/text.htm#l>
- NATO, *The Brussels Treaty*, diakses dari situs resmi NATO http://www.nato.int/cps/ar/natohq/official_texts_17072.htm
- Omnibus Crime Control and Safe Streets, diakses dari https://transition.fcc.gov/Bureaus/OSEC/library/legislative_histories/1615.pdf
- Persandian Dunia*, diakses melalui lembaneg.go.id
- Text of the North Atlantic Treaty*, 4 April 1949 http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_ext_17120.htm
- Vienna Convention 1961, http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf

Dokumen Resmi :

Skripsi :

Adinsa, Dima, 2014 *Penyadapan Alat Telekomunikasi Presiden Republik Indonesia*

oleh Pemerintah Australia ditinjau dari Hukum Internasional. [Skripsi]. Makassar : Universitas Hasanuddin

Christian, Albert, 2014 *Kasus Penyadapan Australia Terhadap Indonesia* . [Skripsi]. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada

Sumarlin Surya, Winata. 2014 *Analisis Wacana Kritis Berita Penyadapan Australia terhadap Indonesia di Republika Online*. [Skripsi]. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Internet :

Agus K, 2015 “*Kasus Snowden*”. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/It51e0c3F2D140b/kasus-Snowden-bukti-pentingnya-lindungi-peniup-pluit> [Diakses pada tanggal 17 – 01 – 2016, pukul 11.25 AM]

Aktual Post, 2015 *Apa Isi Dokumen Rahasia penyadapan AS terhadap Perancis ?* <http://m.aktualpost.com/2015/06/apa-isi-dokumen-rahasia-penyadapan-as-terhadap-prancis/>[Diakses pada 30 Oktober 2015]

Andreas Gerry Tuwo, 2015 *Penyadapan di Istana Presiden Prancis*<http://news.liputan6.com/read/2258825/penyadapa>

n-di-istana-presiden-prancis [Diakses pada 1 november 2015]

AS *Sadap Pengguna Google, Yahoo*. <http://international.sindonews.com/read/800314/42/as-sadap-pengguna-google-yahoo.1383180421>. (Diakses pada 1 Maret 2016, pukul 20:27 wib)

AS *Sadap Telepon 35 Pemimpin Dunia*. <http://international.kompas.com/read/2013/10/25/1053309/AS.Sadap.Telepon.35.Pemimpin.Dunia>. (Diakses pada 1 Maret 2016, pukul 20:43 wib)

AS *Bantah Obama Tahu Penyadapan terhadap Merkel*. <http://international.kompas.com/read/2013/10/28/0955540/AS.Bantah.Obama.tahu.Penyadapan.terhadap.Merkel#page1>. (Diakses pada 1 Maret 2016 pukul 21:00 wib)

AS *Dituding mata – matai Presiden Perancis*. BBC Indonesia. http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/06/150624_dunia_nsa_prancis (Diakses pada 1 Maret 2016, pukul 21:14 wib)